

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku dan ras yang berasal dari berbagai belahan dunia. Penduduk asli benua Amerika tidak pernah menyebut dirinya sebagai suku Indian sebelum pelaut Eropa datang ke daerah mereka. Amerika Serikat memiliki sejarah yang panjang sebelum akhirnya berkembang menjadi negara adidaya seperti saat ini. Berawal dari kumpulan koloni negara-negara Eropa seperti Inggris, Spanyol, Belanda dan Perancis, secara perlahan bangsa Amerika menapaki jalan menuju kejayaan. Bangsa ini pun akhirnya mulai menyebarkan pengaruh ke seluruh dunia dan menjadi sebuah negara besar yang disegani oleh dunia. Pidato Presiden Amerika Serikat yaitu Presiden Monroe yang kemudian dikenal dengan sebutan Doktrin Monroe, menyebutkan bahwa setiap usaha suatu negara memperluas sistem politik di bagian manapun di dunia dianggap sebagai bahaya bagi kedamaian dan keselamatan. (Olsen, 2004). Doktrin Monroe ini semula bersifat defensif, tetapi lambat laun dipraktekkan terlalu jauh oleh Amerika Serikat.

Keterlibatan Iran dalam penelitian dan pengembangan nuklir dimulai pada pertengahan tahun 1960 pada masa pemerintahan Shah atas dukungan Amerika Serikat dalam kerangka kerja perjanjian bilateral antar dua negara tersebut. Amerika Serikat dan Iran menandatangani *Nuclear Cooperation Agreement* pada tahun 1957

yang mulai berlaku pada 1959. (Burr, 2009). Meskipun resmi dimulai pada tahun 1957, program nuklir Iran berjalan relatif lambat sampai dengan tahun 1960 ketika Amerika Serikat mensuplai 5MW reaktor termal (*thermal research reactor*). Perjanjian tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Iran dengan membangun Pusat Penelitian Nuklir di Universitas Teheran pada tahun 1959. (Poneman, 1982) Pusat pengembangan ini menjadi salah satu fasilitas nuklir utama Iran yang diketahui publik yang memiliki 5 megawatt reaktor nuklir yang disuplai oleh Amerika Serikat pada tahun 1967. Reaktor ini mampu memproduksi hingga 600 gram plutonium pertahun.

Pada tahun 1968 tepatnya 1 Juli, ketika pertama kali dibuka untuk persetujuan internasional, Iran menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty). Penandatanganan perjanjian ini memungkinkan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Kemudian pada 13 Maret 1969 Amerika Serikat menyetujui amandemen yang diusulkan oleh Iran terhadap Perjanjian Kerjasama antara Iran-Amerika Serikat mengenai penggunaan energi nuklir untuk tujuan sipil yang pernah disetujui sebelumnya pada tahun 1957.

Program nuklir Iran mendapatkan momentum ketika pada tahun 1973 *Stanford Research Institute* yang berbasis di Amerika Serikat memprediksikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan energinya, Iran perlu mengembangkan sumber energi alternative berbasis non-minyak. Disamping itu *Stanford Research Institute* juga menyarankan pembangunan fasilitas nuklir yang mampu menyalurkan 20.000 megawatt listrik sebelum tahun 1994 (Zarif, Tackling The Iran-US Crisis: The Need

for A Paradigm Shift, 2007).Bersamaan dengan pelatihan teknisi nuklir Iran yang salah satunya dilaksanakan di Amerika Serikat.Program nuklir Iran tidak hanya mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, tetapi juga negara barat lainnya seperti Perancis dan Jerman. Kedua negara tersebut pada 1974 menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Iran untuk mensuplai bahan baku yang dibutuhkan untuk program nuklir Iran.

Seluruh rangkaian kerjasama dalam bidang energi nuklir ataupun yang terkait program nuklir Iran dengan negara barat baik Amerika Serikat maupun Jerman atau Perancis terhenti ketika terjadi Revolusi Islam yang terjadi pada Februari 1979. Ketika Revolusi Islam menumbangkan rezim Shah Reza Pahlevi, proses pembangunan reaktor Bushehr-1 telah mencapai 90%, dimana 60% dari seluruh peralatan telah selesai dipasang.Sedangkan reaktor Bushehr-2 baru mencapai 50% (Sahimi, 2003).Pada tanggal 4 November 1979, sekelompok mahasiswa revolusioner Iran, yang menggambarkan diri mereka sebagai Siswa yang Mengikuti Garis dari Imam Khomeini mengambil alih Kedutaan Besar AS di Teheran (Nasir, 2011).Insiden penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab Amerika Serikat menarik semua dukungan dan bantuannya pada perjanjian kerjasama program nuklir.

Berdasarkan laporan CIA pada tahun 1988, Iran menghentikan program nuklirnya pada tahun 1979, namun kembali melanjutkan program ini di tahun 1982 (K.Kerr, 2016). Di tahun 1985, berdasarkan laporan *National Intelligence Council*, Iran merupakan ancaman potensial terhasap proliferasi, dan disebutkan bahwa

Teheran tertarik untuk mengembangkan fasilitas yang dapat sewaktu-waktu memproduksi material yang dapat digunakan untuk persenjataan.

Ketika era pemerintahan Shah Reza Pahlevi berakhir dan digantikan melalui sebuah Revolusi Islam pada tahun 1979, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran tidak berlangsung seharmonis pada saat pemerintahan Shah Reza Pahlevi. Pemimpin revolusi Ayatullah Khomeini yang kemudian menjadi Pemimpin Spritual atau Pemimpin Tertinggi. Iran sering melontarkan kritik terhadap Amerika Serikat dan pemimpin negara-negara sekuler Arab. Ayatullah Khomeini memandang bahwa rezim korup Shah Reza Pahlevi mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dalam melakukan modernisasi dan westernisasi Iran. Amerika Serikat juga dianggap terlalu mengintervensi dan mencemari nilai-nilai dan tradisi Islam.

Pada tahun 2005, kontroversi seputar isu program nuklir Iran semakin memuncak menjadi krisis internasional. Pada Januari 2005, dalam sebuah wawancara di televisi NBC, Presiden Bush menanggapi perkembangan program nuklir Iran menyatakan bahwa serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran adalah salah satu alternatif terutama jika Iran terus bersikeras untuk melanjutkan program nuklirnya, dan menolak untuk terbuka dan transparan mengenai program nuklirnya tersebut (Reuters, 2005). Pernyataan Presiden Bush tersebut didukung oleh pernyataan senada dari Wakil Presiden Dick Cheney yang menyebutkan bahwa Iran menempati urutan teratas dalam daftar permasalahan global. Wakil Presiden Cheney juga menyebutkan bahwa krisis nuklir Iran dapat memicu serangan *preemptive* terhadap Iran. *Pre-emptive* adalah doktrin pertahanan yang berkembang setelah tragedi 11 September

2001 di Amerika Serikat. Doktrin ini mengutamakan serangan terlebih dahulu kepada elemen musuh atau negara yang dianggap musuh sebelum negara atau elemen tersebut melancarkan serangan ke Amerika Serikat. Doktrin preemptive dilaksanakan oleh Pemerintah Amerika Serikat ketika menginvasi Irak pada tahun 2002. (Sari, 2016)

Amerika Serikat khawatir dengan penguasaan ilmu pengetahuan Iran yang sangat maju. Pertengahan tahun 2005, Presiden George W. Bush telah beberapa kali melakukan pembicaraan mengenai serangan militer ke Iran. Misalnya, Presiden Bush bekerjasama dengan Israel dan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dalam bidang militer untuk merencanakan perang nuklir terhadap Iran (Yayak, 2007). Pada tanggal 6 Agustus 2005, Mahmud Ahmadinejad secara resmi menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran yang ke 6. Presiden Mahmud Ahmadinejad menempatkan program nuklir Iran sebagai sebuah prioritas dalam rangkaian kebijakan pemerintahannya. Presiden Ahmadinejad dipandang sebagai tokoh Konservatif garis keras dengan latar belakang revolusioner yang dipandang cenderung menggunakan pendekatan konfrontatif dengan Amerika Serikat (Recknagel, Iran: New President Represents Second Generation of Islamic Revolutionaries, 2005). Keteguhan dan komitmen Iran terhadap program pengembangan nuklir yang dimiliki Iran yang menyebabkan IAEA (International Atomic Energy Agency) merancang sebuah resolusi pada 11 Agustus 2005. Resolusi yang diumumkan pada tanggal 3 September 2005 tersebut merupakan ultimatum

terhadap Iran agar menghentikan segala aktifitas yang berkenaan dengan pengembangan nuklirnya.

Pada tanggal 24 September 2005, akhirnya IAEA menyatakan bahwa Iran melanggar NPT dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya resolusi yang menyatakan bahwa Iran melanggar dan tidak mematuhi kewajibannya terhadap kesepakatan penjagaan (safeguard agreement) NPT. Iran diduga tidak mematuhi NPT Safeguards Agreement, sehingga kecurigaan mengarah pada adanya upaya Iran untuk melakukan pengayaan uranium ke tingkat yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Amerika Serikat akan melakukan intervensi terhadap Iran. Menurut analisis intelijen William Arkin (*Washington Post*, 16 April 2006), rencana aksi militer terhadap Republik Islam Iran tersebut mencakup serangan peluru kendali, invasi darat, dan operasi di laut, yang dikenal sebagai "Theater Iran Near Term" atau TIRANNT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di depan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

“Mengapa Amerika Serikat mengintervensi pengembangan teknologi nuklir Iran?”

C. Kerangka Dasar Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan sikap serta komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya, strategi dasar suatu negara yang bertujuan untuk kepentingan nasional yang harus dicapai di luar batas wilayahnya, dan hal ini diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijakan politik suatu negara. Kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sikap dan aktifitas melalui mana negara mencoba mengatasi masalah serta mencapai keuntungan dari lingkungan internasional (Rosenau, *Comparing Foreign Policy*, 1974). Kebijakan luar negeri merupakan respon atas sejumlah peristiwa baik eksternal maupun internal, yang ditujukan bagi tujuan-tujuan yang berbeda aksinya dalam mewujudkan berbagai bentuk dan menghasilkan banyak-banyak tujuan (Rosenau, *World Politics: An Introduction*, 1976)

Jack C. Plano dan Roy Olton menyatakan bahwa:

Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities aimed at achieved specific goals defined in terms of national interest” (Olton J. C., 1969)

Dari definisi diatas bisa diartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh pembuat kebijakan suatu negara terhadap negara lain ditujukan untuk mencapai tujuan khusus yang dapat

didefinisikan dalam istilah kepentingan nasional. Terdapat beberapa unsur utama dalam politik luar negeri yaitu: strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Kepentingan suatu negara digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya lebih sederhana lagi politik luar negeri diartikan sebagai iringan kebijaksanaan yang disertai rentetan tindakan yang rumit tapi dinamis yang ditempuh oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. Karena situasi internasional yang tidak statis melainkan sarat dengan berbagai pola dan kecenderungan berkembang maka kebijakan yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri selalu memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika tersebut.

Saat ini Amerika Serikat menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman bagi keamanan Amerika Serikat. Amerika Serikat menuduh Iran telah mengembangkan senjata nuklir. Untuk itu Amerika Serikat mempengaruhi dunia internasional untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya secepatnya. Amerika Serikat yang mempunyai kebijakan luar negeri untuk menghentikan program nuklir Iran, maka dalam politik luar negerinya Amerika Serikat meminta dukungan dunia internasional untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya dengan menuduh bahwa program nuklir Iran digunakan untuk membuat senjata nuklir. Untuk itu dunia internasional harus menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya demi keamanan dunia.

Dalam menjalin atau melakukan hubungan dengan negara lain, suatu negara mempunyai politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh negara tersebut terhadap negara lain. Hasil kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungannya yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan dengan negara lain. Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Amerika Serikat melakukan hubungan bilateral dan multilateral. Dalam hubungan bilateral Amerika Serikat melakukan hubungan dengan Israel sedangkan dalam hubungan multilateral Amerika Serikat ikut bergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Amerika Serikat yang memiliki hubungan bilateral dengan Israel maka jalan politik luar negeri kedua negara ini hampir sejalan yaitu sama-sama berusaha menghentikan program nuklir Iran. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki perhatian lebih terhadap kebangkitan Iran, terutama dalam program nuklir. Kebijakan mempengaruhi Iran merupakan kebijakan yang rasional (Lynn E. Davis, 2011). Kebijakan Amerika Serikat merumuskan tujuan untuk mencegah Iran membangun persenjataan nuklir, menghalangi Iran menggunakan senjata nuklirnya.

Sedangkan dalam hubungan multilateralnya Amerika Serikat mempengaruhi negara-negara yang menjadi anggota PBB untuk mendapatkan dukungan dalam menghentikan program nuklir Iran. Amerika Serikat mempunyai kebijakan politik luar negeri untuk mempengaruhi dunia Internasional agar menekan Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Melalui Dewan Keamanan PBB Amerika

mendorong agar Dewan Keamanan PBB melakukan tindakan berupa sanksi-sanksi serta beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang di keluarkan untuk menghambat pengembangan teknologi nuklir Iran.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang populer dalam menganalisa permasalahan yang timbul dalam kajian hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku. Kepentingan nasional tersebut dapat dijadikan alasan suatu negara untuk mengambil suatu kebijakan luar negerinya. Analisis yang sering digunakan oleh para peneliti hubungan internasional adalah konsep kepentingan nasional, sebab konsep kepentingan nasional merupakan dasar bagi suatu negara untuk menjelaskan perilaku luar negeri serta sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan politik luar negeri suatu negara. Konsep kepentingan ini sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan luar negeri (Pickles, 2001)

Penulis menggunakan analisis berdasarkan konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam penelitian ini. Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton merupakan tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan kepentingan utamanya, termasuk didalamnya hak untuk mempertahankan diri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan dan kesejahteraan ekonomi (Olton J. C., 1980)

Jack C. Plano dan Roy Olton mengungkapkan apa yang dimaksud kepentingan nasional adalah politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang tujuannya mencapai kepentingan nasional (Olton J. C., 1980, p. 127)

Kepentingan nasional secara umum dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut sarana yang dilakukan adalah dengan melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional. Menurut Jack C. Plano kepentingan nasional suatu negara tersebut yang dijadikan dasar dan penentu utama yang menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri atau tujuan utama yang dituju oleh negara yang mempunyai kepentingan tersebut. Kepentingan nasional yang menjadi dasar dapat mencakup (Olton J. C., 1980, p. 217)

- 1. Pertahanan diri (*self preservation*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki *power* besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan diri (*self preservation*) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan

pertahanan terhadap geografis negara tetapi berkaitan dengan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lain, sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

2. **Kemandirian (*independence*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dengan tujuan agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya.
3. **Integritas territorial (*territorial integrity*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.
4. **Keamanan militer (*military security*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya; dan
5. **Kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*)**, adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk memperoleh cadangan devisa negara lain, misalnya minyak dan gas. Kepentingan nasional tersebut bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Suatu negara dituntut untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya serta menyediakan seluruh kebutuhan yang mendukung terciptanya kesejahteraan. Oleh karena itu salah satu aspek dalam konsep kepentingan nasional untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yaitu keamanan militer.

Kepentingan nasional suatu negara dalam bidang Pertahanan diri (self preservation) tercipta dikarenakan suatu negara berkewajiban menjaga keamanan nasional negaranya, menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, serta menjaga keutuhan negara dari ancaman negara lain salah satu cara sederhana dan yang paling utama dan dilakukan oleh suatu negara adalah dengan meningkatkan mempertahankan diri dari negara lain menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar dan rasional terutama bagi para pemikir realis yang menganggap bahwa dunia itu anarki sehingga kepentingan nasional suatu negara dalam bidang keamanan merupakan yang terpenting. Apabila keamanan negara sudah terjamin maka negara tersebut dapat dengan mudah memajukan perekonomian negaranya.

Selain itu kepentingan nasional keamanan juga harus memperhatikan kondisi politik internasional serta kekuatan negara tetangga atau negara lain yang berpotensi mengancam keamanan dalam arti lain setiap negara berkewajiban mengantisipasi kemungkinan munculnya dari negara lain. Dalam konteks pengembangan nuklir Iran

hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Iran untuk meningkatkan pertahanan dirinya yang melindungi dalam negeri yaitu Iran menurut kaum realis merupakan hal yang sangat wajar. Begitupun bagi Amerika Serikat yang menganggap pengembangan nuklir Iran merupakan ancaman sehingga perlu diantisipasi. Kedua Negara sama-sama memiliki kepentingan nasional keamanan yang bagi keduanya perlu dicapai.

3. Konsep *Balance Of Power*

Konsep *Balance of Power* atau keseimbangan kekuasaan dipakai untuk menunjukkan hubungan kekuasaan, khususnya pada sistem negara Eropa mulai dari Perang Napoleon hingga Perang Dunia Pertama. Konsep *Balance of power* adalah konsep yang teramat sering didiskusikan. Sebagai akibatnya, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda oleh para pemikir mengenai konsep dari *Balance of power*. Melalui konsep ini, negara berusaha mempertahankan statusnya sebagai suatu entitas yang Independen.

Realis tradisional memandang *balance of power* sebagai suatu cara, konsep, atau teori yang berpusat pada power. Hans Morgenthau dalam *International Politics* mengasumsikan *Balance of power* sebagai suatu realita, dimana kekuatan dibagi sama rata atau dikendalikan bersama secara adil oleh sekelompok negara. Sekelompok negara tersebut tentunya memiliki keinginan untuk menghancurkan dan atau mempertahankan *status quo*. Menurut realis tradisional, tujuan utama dan mendasar dari sebuah *foreign policy* adalah untuk mendapatkan power, tidak terkecuali *Balance*

of power. Balance of power menjadi satu-satunya alternative untuk mencegah suatu negara *great power* untuk memiliki kekuatan yang melimpah, yang dapat menimbulkan perasaan terancam oleh negara lain yang lebih lemah (Hans J.Morgenthau, 2010)

Konsep *balance of power* tidak jauh berbeda dengan konsep *balance of terror* yang dimana *balance of terror* lebih spesifik kepada perimbangan ancaman nuklir antara kedua Negara. Menurut Dr.Surwandono sebagai pengajar Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, disebutkan bahwa *balance of terror* yaitu. Dalam literasi hubungan internasional, konsep *balance of terrors* merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses menciptakan keseimbangan baru melalui instrumen nuklir. Dengan kekuatan destruksinya yang sangat masif, nuklir telah menjadi teror yang sangat mengerikan bagi setiap aktor hubungan internasional. Menguasai teknologi nuklir secara masif akan mendongkrak kekuatan suatu negara menjadi negara yang *powerful*. Setidaknya negara besar yang selama ini bisa mendikte perilaku politik negara kecil, akan berfikir dua sampai tiga kali jika negara tersebut menguasai teknologi nuklir (Dr.Surwandono, 2010)

Ketangguhan militer secara tradisional telah menjadi salah satu lambang yang membedakan negara besar dengan negara kecil. Perbedaan ini telah bergeser pada perbedaan antara negara senjata nuklir dan negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Kemampuan nuklir cenderung melemahkan arti penting dasar-dasar tradisional kekuasaan yang meliputi penduduk, wilayah, kemampuan industri, dan lain-lain. Dan

saat ini nuklir lebih banyak mengurangi daripada memperluas perbedaan antara bangsa yang besar dan bangsa yang kecil. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa alat-alat perang konvensional adalah kuno, karena sesungguhnya sebagian besar kekuatan militer bangsa-bangsa masih terbatas pada senjata konvensional. Untuk mengatasi keterbatasan senjata konvensional itu maka negara kecil menggunakan tenaga nuklir sebagai cara non-konvensional dalam menghadapi sejumlah provokasi dari negara besar. Dengan kekuatan destruksinya yang sangat masif, nuklir telah menjadi teror yang sangat mengerikan bagi setiap aktor hubungan internasional. Menguasai teknologi nuklir secara masif akan mendongkrak kekuatan suatu negara menjadi negara yang *powerful*. Dalam kasus persaingan kekuatan militer antara Amerika dan Iran kita bisa melihat adanya perimbangan kekuatan atau yang di sebut dengan *Balance of terrors*. Program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh kedua negara menjadikan keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam hal persenjataan. Mengingat nuklir sama-sama bisa menghancurkan dan memusnahkan. Konsep *balance of terrors* inilah yang tampaknya dipergunakan oleh Iran untuk menciptakan keseimbangan baru.

Diluar dari pelaksanaan pengadaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Iran, pengadaan senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat menunjukkan adanya tindakan dari tidak dipergunakannya nuklir tersebut secara langsung. Hal tersebut terkait dengan munculnya *Nuclear Taboo*, yang merupakan salah satu tindakan dalam pengupayaan untuk mengurangi penggunaan dari senjata nuklir. Kepemilikan

nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat mungkin terhitung sejak lama, namun pada penggunaannya dalam pengambilan keputusan terkait dengan akan digunakannya senjata nuklir tersebut atau tidak, Amerika Serikat pada tahun 1945 menunjukkan tindakan yang tidak menginginkan adanya tindakan yang gegabah dalam mengeluarkan senjata nuklirnya. Keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat tersebut menunjukkan adanya sebuah ide-ide yang normatif terkait dengan moralitas dan legitimasi yang berpengaruh pada munculnya pengembangan kolektif, memperkuat dari norma terkait dengan non-penggunaan senjata nuklir, atau tabu senjata nuklir. Terkait dengan *Nuclear Taboo* merupakan salah satu alasan yang memengaruhi dari perilaku negara yang memiliki senjata nuklir dan menunjukkan identitas dan kepentingannya sebagai bangsa beradab. Maka, dengan alasan inilah yang kemudian menyebabkan Amerika Serikat pada tahun 1945 tidak mudah untuk meledakkan senjata nuklirnya dalam perang karena resultan kerusakan yang akan ditimbulkan adalah hal yang bertentangan dengan identitas nasional Amerika Serikat sebagai bangsa yang beradab. (Tannenwald, 2007)

D. Hipotesis

Melalui uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa alasan Amerika mengambil kebijakan luar negeri yang menolak pengembangan nuklir Iran dengan menghentikan program nuklirnya karena Amerika Serikat tidak suka terhadap sikap Ahmadinejad yang anti Amerika Serikat dan tidak ingin nuklir itu disalah gunakan untuk mengancam stabilitas di timur tengah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai hubungan Amerika Serikat dan Iran.
2. Meneliti dan mengetahui alasan Amerika Serikat mengintervensi Iran dalam pengembangan nuklir.
3. Meneliti apa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kemajuan Iran.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang pasang surutnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran terutama dalam pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Iran. Batasan penelitian ini menggunakan jangka waktu pada masa pemerintahan Ahmadinejad yaitu pada jangkauan waktu tahun 2005 sampai 2012.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur. Referensi yang digunakan meliputi studi pustaka dari berbagai buku, surat kabar, jurnal ilmiah, internet dan dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam meneliti Kepentingan Amerika Serikat mengintervensi pengembangan nuklir Iran pada pemerintahan Ahmadinejad tahun 2005-2012.

Bab II Program pengembangan nuklir Iran, membahas sejarah, latar belakang, tujuan program nuklir Iran pasca revolusi islam di Iran dan penerapan program nuklir Iran pada masa Presiden Ahmadinejad di samping itu di bahas mengenai penerapan NPT terhadap Iran.

Bab III Menjelaskan tentang politik luar negeri Amerika Serikat secara global dan pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W.Bush dan Barrack Obama serta faktor yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Bab IV Menjelaskan Respon Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir Iran pada masa Ahmadinejad dan intervensi Amerika pada pemerintahan George W.Bush serta upaya Amerika menghentikan melalui penerapan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB.

Bab V Menjelaskan kesimpulan dari skripsi ini